



Katalog BPS : 4102004.7271

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALU 2009



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU

KATA PENGANTAR

Dalam rangka evaluasi dan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang diperlukan suatu parameter yang dapat mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya .

*Untuk memenuhi maksud tersebut BPS Kota Palu berupaya menerbitkan publikasi "**Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palu 2009**" yang merupakan kelanjutan dari publikasi yang telah diterbitkan secara rutin pada tahun-tahun sebelumnya.*

*Publikasi **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palu 2009** menyajikan dan mengulas kondisi sosial masyarakat dan perkembangannya dari waktu ke waktu serta keterbandingan dengan daerah lain mengenai berbagai aspek, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan serta aspek-aspek sosial lainnya.*

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih sangat sederhana dan sudah barang tentu terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, sehingga sangat diharapkan masukan positif dari berbagai pihak guna kesempurnaan penerbitan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga publikasi ini dapat memberi manfaat kepada seluruh pembaca khususnya para pembuat kebijakan dan perencanaan serta dapat menjadi bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Palu, Juni 2009

**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU
KEPALA,**

**Ir. ARFANDI
NIP.19650801 199103 1 003**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Ruang Lingkup.....	1
I.3. Sistematika Penulisan.....	1
I.4. Sumber Data	2
BAB II KEPENDUDUKAN	
II.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	5
II.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
II.3. Komposisi /Struktur Umur	6
BAB III KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
III.1. Derajat Kesehatan (Morbiditas)	11
III.2. Penolong Persalinan	12
III.3. Air Susu Ibu (ASI)	14
III.4. Keluarga Berencana	15
BAB IV PENDIDIKAN	
IV.1. Partisipasi Pendidikan	20
IV.2. Angka Melek Huruf	22
IV.3. Tingkat Pendidikan	22
IV.4. Sarana dan Prasarana	23
BAB V KETENAGAKERJAAN	
V.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	26
V.2. Pengangguran dan Jam Kerja	27
BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	
VI.1. Kualitas Bangunan	32
VI.2. Fasilitas Bangunan	33
BAB VII PENGELUARAN/KONSUMSI	
VII.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan	36
VII.2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan	37

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palu Tahun 1990 - 2008	5
Tabel II.2.	Rata-rata Kepadatan Penduduk Kota Palu Tahun 2008	5
Tabel II.3.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sek Rasio Tahun 2008	6
Tabel III.1.1	Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Tahun 2008	11
Tabel III.1.2.	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu dan Lamanya Hari Sakit 2008	12
Tabel III.2.	Persentase Penolong Kelahiran Menurut Darah Tahun 2008.....	12
Tabel III.3.1.	Persentase Balita yang Disusui atau Tidak Disusui Tahun 2008....	14
Tabel III.3.2.	Persentase Balita Umur 2-4 Tahun yang Pernah disusui menurut Lamanya Disusui Tahun 2008.....	14
Tabel III.4.1.	Persentase Penduduk Usia 15 – 49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat KB Tahun 2008 ...	16
Tabel III.4.2.	Persentase Penduduk Usia 15 – 49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Sedang/Tidaknya Menggunakan Alat KB Tahun 2008 ...	16
Tabel III.4.3.	Persentase Penduduk Usia 15 – 49 Tahun dan sedang Ber KB Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Tahun 2008	17
Tabel IV.1.1.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kota Palu Tahun 2008	20
Tabel IV.1.2.	Partisipasi sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Palu Tahun 2008	21
Tabel IV.2.	Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kota Palu Tahun 2005 s.d 2008	22
Tabel IV.3.	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kota Palu Tahun 2008	22
Tabel IV.4.1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kota Palu Tahun 2008	23
Tabel IV.4.2.	Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Sekolah di Kota Palu Tahun 2008/2009	23
Tabel V.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2008	27
Tabel V.2.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (<i>Unemployment Rate</i>) Tahun 2008.....	28
Tabel V.2.2.	Persentase Penduduk menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin Tahun 2008	29
Tabel V.2.3	Rata – rata Jam Kerja Selama Seminggu lalu Tahun 2008	29
Tabel V.2.4.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2008	29

Tabel VI.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap, Jenis Dinding dan Jenis Lantai Terluas yang Ditempati di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2008.....	33
Tabel VI.2.1.	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Oleh Rumah Tangga Tahun 2008	34
Tabel VI.2.2.	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Oleh Rumah Tangga Tahun 2008	34
Tabel VI.2.3.	Persentase Penggunaan Fasilitas Penerangan Oleh Rumah Tangga Tahun 2008	34
Tabel VII.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan Tahun 2008	37
Tabel VII.2.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan Tahun 2008	37
Tabel VII.3.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2008	37

<https://palukota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Distribusi Persebaran Penduduk Kota Palu Tahun 2008	6
Gambar 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Sek Rasio) Tahun 2008	7
Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Palu Tahun 2008.....	9
Gambar 4. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Palu Tahun 2008.....	13

<https://palukota.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan yang sedang kita laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha di berbagai bidang. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya data dan ukuran-ukuran yang dapat mencerminkan keadaan/fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat kompleks. Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat kemajuan/ perkembangan dari faktor-faktor atau komponen-komponen penyusun aspek kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterbandingan tahapan pencapaian pembangunan antar wilayah/daerah dapat pula dicerminkan oleh indikator-indikator tersebut sehingga pada akhirnya gambaran tentang pencapaian suatu tahapan pembangunan dapat diperoleh.

I.2. Ruang Lingkup dan Tujuan

Indikator Kesejahteraan rakyat ini mencakup beberapa aspek bidang kesra yang biasa diukur, antara lain bidang kependudukan, fertilitas dan KB, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan serta pengeluaran dan konsumsi.

Publikasi ini dibuat sebagai upaya meningkatkan jenis publikasi bidang sosial. Melalui publikasi ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat di daerah ini sebagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, serta dapat menjadi bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

I.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008 ini disajikan dalam 6 bab, yang mana setiap bab memuat suatu karakteristik sosial seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan serta Pengeluaran dan konsumsi.

Indikator-indikator kependudukan yang dibahas dalam Bab II menggambarkan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatannya, serta komposisi penduduk.

Indikator Kesejahteraan Rakyat yang mencakup masalah kesehatan diuraikan dalam Bab III yang meliputi derajat kesehatan, penolong kelahiran, Pemberian Asi dan lain-lain.

Indikator bidang pendidikan disajikan dalam Bab IV mencakup tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, rasio antara murid dan guru serta sarana pendidikan yang tersedia.

Indikator yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diuraikan dalam Bab V menyangkut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pengangguran dan jam kerja.

Dalam Bab VI dibahas secara ringkas tentang indikator-indikator perumahan dan lingkungan, seperti jenis atap, jenis dinding, jenis lantai rumah dan fasilitas rumah lainnya.

Bab VII dari publikasi ini memuat indikator tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat konsumsi/pengeluaran rumah tangga.

I.4. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari beberapa sumber seperti:

1. Sensus Penduduk (SP)
2. Survei Penduduk Antar Sensus (Supas' 2005)
3. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
4. Data Skunder

KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Seorang ilmuwan (Malthus) yang hidup pada tahun 1766 - 1843 mengemukakan masalah tersebut ketika melihat hubungan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk begitu pesatnya sehingga mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan persediaan pangan mengikuti deret hitung. Akibatnya pertumbuhan jumlah penduduk secara terus menerus tanpa adanya intervensi

(pengendalian) akan menimbulkan masalah/kesenjangan dalam hal penyediaan pangan penduduk.

Suatu daerah kota yang jumlah penduduknya sudah sangat tinggi merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran, munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

II.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (Fertilitas), kematian (Mortalitas) dan perpindahan penduduk (Migration).

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Demikian halnya dengan penduduk Kota Palu, dari hasil sensus penduduk Tahun 1990 diketahui berjumlah 199.445 jiwa. Selanjutnya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 diketahui jumlah penduduk Kota Palu telah mencapai 269.083 jiwa, kemudian dari hasil Supas 2005 jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2008 diperkirakan telah mencapai jumlah 309.032 jiwa

Tabel II.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palu Tahun 1990 s.d. 2008

Jenis Kela min	Jumlah Penduduk			Rata-rata Laju Pertumbuhan /tahun	
	SP. 1990	SP. 2000	Supas 2008	1990- 2000	2000- 2008
L	101.783	135.263	152.688	2,94	1,62
P	97.662	133.820	156.344	3,26	1,61
L+P	199.445	269.083	309.032	3,15	1,75

Sumber: SP'90; SP'2000; Proyeksi Supas 2005

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Palu Selatan, dimana pada tahun 2008 tercatat 35,67 persen, diikuti oleh Kecamatan Palu Barat sebanyak 29,98 persen, Kecamatan Palu Timur sebanyak 22,54 persen, dan yang terendah di Kecamatan Palu Utara sebanyak 11,82 persen.

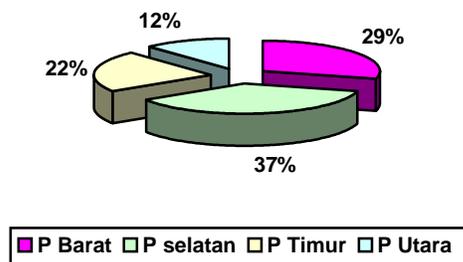
Laju pertumbuhan penduduk yang merupakan indikator dari tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kota Palu bervariasi antar kecamatan, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Palu Selatan dan yang terendah di Kecamatan Palu Timur. Rata-rata pertumbuhan penduduk dari Tahun 1990 – 2000 mencapai 3,15 persen, sedangkan pertumbuhan dari Tahun 2000 – 2008 mencapai 1,75 persen.

II.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk di wilayah Kota Palu tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, dimana Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Utara yang menempati urutan luas wilayah terluas pertama dan kedua hanya menduduki urutan ke tiga dan ke empat dalam hal jumlah penduduk. Ini adalah

merupakan hal yang biasa sebagai ciri demografi yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan geografis.

Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat secara geografis sebagian besar wilayahnya terletak di perkotaan yang merupakan ibu kota Kota Palu, sementara itu Kecamatan Palu Timur walaupun sebagian wilayahnya merupakan daerah perkotaan yang juga merupakan pusat Ibu Kota Propinsi, namun sebagian besar wilayahnya (Poboya) merupakan daerah berbukit dan bergunung dan bahkan sebagian terbesar wilayahnya adalah merupakan hutan cagar alam. Sedangkan Kecamatan Palu Utara adalah merupakan kecamatan yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tawaeli (Kab. Donggala) dan semua wilayahnya berada di pinggiran wilayah perkotaan. Distribusi penduduk Kota Palu menurut Kecamatan terlihat seperti gambar berikut.



Gambar 1.
Persentase Persebaran Penduduk Kota Palu
Menurut Kecamatan Tahun 2008

Kepadatan penduduk sangat tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah. Dalam hal kepadatan penduduk, Kecamatan Palu Selatan juga menempati urutan pertama dengan rata-rata 1.797 Jiwa/Km² diikuti oleh Kecamatan Palu Barat dengan kepadatan 1.612 jiwa/Km², Palu Utara dengan kepadatan 407 jiwa/Km² dan Kecamatan Palu Timur dengan rata-rata kepadatan 373 jiwa/Km².

Tabel II.2. Rata-rata Kepadatan Penduduk Kota Palu Tahun 2008

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/ Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Palu Barat	57,47	92.644	1.612
Palu Selatan	61,35	110.218	1.797
Palu Timur	186,55	69.651	373
Palu Utara	89,69	36.519	407
Kota Palu	395,06	309.032	782

Sumber: diolah dari ProyeksiSupas 2005

II.3. Komposisi/Struktur Penduduk

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat berbeda dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas,

mortalitas, migrasi dan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Rasio" adalah merupakan indikator untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

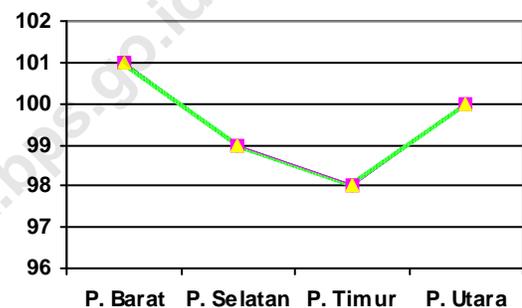
Tabel II.3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Tahun 2008

Kecamatan	Penduduk		Sex Ratio
	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)
Palu Barat	45.970	46.674	99
Palu Selatan	54.603	55.615	98
Palu Timur	34.110	35.541	96
Palu Utara	18.005	18.514	97
Kota Palu	152.688	156.344	98

Sumber: Proyeksi Supas 2005

Walaupun diketahui sex rasio pada tingkat kecamatan bervariasi antara 96 sampai 99, namun secara kumulatif pada tingkat Kota Palu dalam lima tahun terakhir komposisi

penduduk laki-laki dan perempuan telah hampir berimbang (sex rasio = 100), dan bahkan terdapat kecenderungan secara perlahan-lahan sex rasio menuju pada angka di bawah 100 sebagaimana yang telah terjadi di Kecamatan Palu Timur dan Palu Selatan yang pada Tahun 2008 telah mencapai angka 96.



Gambar 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Seks Rasio) Tahun 2008

Berdasarkan struktur umur penduduk dapat diketahui tingkat ketergantungan antara penduduk yang belum/tidak produktif dengan penduduk usia produktif dan untuk mengelompokkan apakah penduduk pada suatu daerah tergolong dalam penduduk muda, *intermediate* atau penduduk tua, serta dapat pula dilihat trend yang terjadi sebagai dampak positif dari pembangunan bidang kesehatan dan KB serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Rasio Ketergantungan Anak (Child Dependency Ratio) di Kota Palu Tahun 2008 tercatat sebesar 35,87 yang berarti bahwa terdapat sekitar 36 orang anak menjadi beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. Disisi lain penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (Old Dependency Ratio) Tahun 2008 di Kota Palu sebesar 3,65.

Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut digabungkan maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (Dependency Ratio) sebesar 39,52. Ini berarti setiap 2 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 1 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kota Palu. pada Tahun 2000 penduduk di bawah usia 15 tahun mencapai 30,54 persen dari total penduduk Kota Palu yang berjumlah 263.826 jiwa. sedangkan pada Tahun 2008 berdasarkan proyeksi SUPAS 2005 jumlah penduduk 309.032 jiwa terdapat sekitar 25,71 persen yang berusia di bawah 15 tahun.

Dengan demikian Kota Palu dalam memasuki usianya yang ke sepuluh sejak terbentuknya Kotamadya Palu, penduduknya tergolong dalam penduduk Intermediet, dimana proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun berada di bawah 30 persen.

Di sisi lain juga terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan sebanyak 530 orang atau naik sebesar 10,30 persen.

Tabel II.4. Penduduk Kota Palu menurut Kelompok Umur Tahun 2000 dan 2008

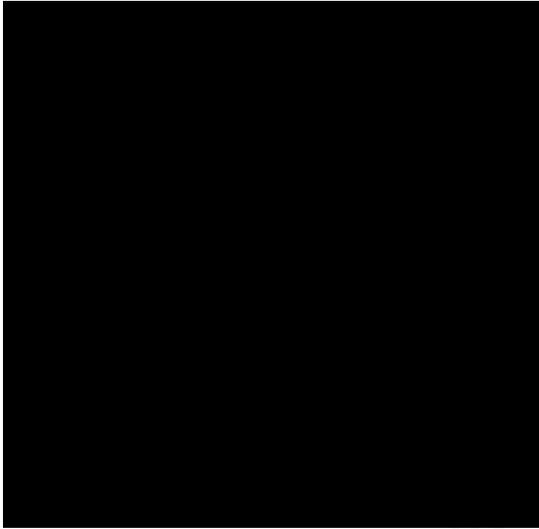
Kel. Umur	Tahun	
	2000	2008
(1)	(2)	(3)
0-4	28.917	27.959
5-9	25.840	23.374
10-14	25.836	28.125
15-19	32.301	35.717
20-24	32.180	37.825
25-29	27.189	29.681
30-34	23.656	31.290
35-39	19.400	24.814
40-44	15.264	19.148
45-49	11.129	15.872
50-54	8.116	13.207
55-59	5.029	8.059
60-64	3.824	5.875
65+	5.144	8.087
Jumlah	263.826*)	309.032**)

Sumber : **) Proyeksi Supas 2005

*) SP'2000, tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap

Berdasarkan umur dan jenis kelamin penduduk Kota Palu masih

menunjukkan ciri penduduk ekspansive dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda sebagaimana diperlihatkan pada piramida penduduk di bawah ini.



Gambar 3.
Piramida Penduduk Kota Palu Tahun 2008

BAB III

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Obat Desa, Posyandu, serta penyediaan sarana air bersih.

Kemiskinan yang terjadi menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan dan gizi masyarakat, terutama keluarga miskin. Oleh karena itu pemerintah melakukan intervensi untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Secara fisik kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat kesehatannya

yang juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa aspek yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat antara lain: Angka Morbiditas, Proporsi anak masih hidup, penolong persalinan, status gizi dan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel III.1.1. Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Tahun 2008

Jenis Kelamin	Keluhan Kesehatan	
	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)
Kota Palu:		
- L	38,93	61,07
- P	38,01	61,99
- L+P	38,48	61,52
Sulawesi Tengah	39,65	60,35

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

III.1. Derajat Kesehatan (Morbiditas)

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan (morbidity rate). Angka

kesakitan dapat dibedakan atas ada tidaknya keluhan kesehatan, jenis penyakit/keluhan yang dialami dan lamanya merasakan keluhan. Tabel III.1.1 menunjukkan persentase penduduk yang tidak dan yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan yang lalu.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa derajat kesehatan penduduk Kota Palu masih sangat rendah, dimana kurang lebih 38,93 persen penduduk laki-laki dan 38,01 persen perempuan mempunyai keluhan kesehatan. Namun demikian, keadaan ini memperlihatkan kecenderungan menurun untuk laki-laki, yaitu dari 39,51 persen pada tahun 2007 menjadi 38,93 persen tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk perempuan yaitu dari 39,03 persen pada tahun 2007 menjadi 38,01 persen pada tahun 2008.

Keluhan kesehatan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi terutama bagi mereka yang telah bekerja, dan pada gilirannya akan menurunkan produktivitas. Disamping itu keluhan kesehatan tentunya akan berakibat pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan.

Sekitar 53,32 persen penduduk mengalami gangguan kesehatan kurang dari 4 hari, 36,64 persen merasakan gangguan 4-7 hari, dan yang mengalami gangguan lebih dari 8 hari sebanyak 4,96 persen serta lebih dari 14 hari 5,08 persen

Kondisi yang sama juga terjadi pada seluruh daerah di Sulawesi Tengah, dimana lamanya terganggu kurang dari 4 hari paling banyak dialami masyarakat, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.2. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu dan Lamanya Hari Sakit Tahun 2008.

Jenis Kelamin	Lamanya Menderita Sakit (hari)			
	<4	4-7	8-14	> 14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Palu:				
L	52,72	35,97	5,79	5,52
P	54,05	37,44	3,96	4,56
L+P	53,32	36,64	4,96	5,08
Sulteng	48,33	38,21	7,69	5,77

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

III.2. Penolong Persalinan

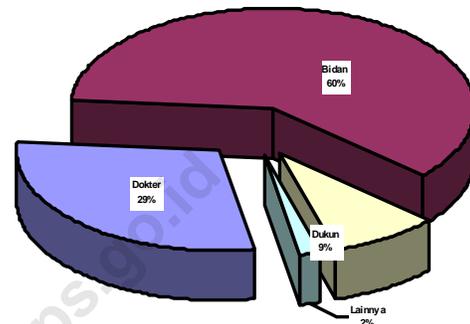
Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu

khususnya pada saat mengandung juga dipengaruhi oleh faktor lain, salah satu diantaranya adalah penolong kelahiran. Data tentang komposisi penolong pada waktu melahirkan dapat menjadi salah satu indikator kesehatan ibu dan anak, serta indikator tingkat pelayanan kesehatan secara umum.

Secara teoritis bahwa penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan lebih baik terhadap kesehatan ibu dan anak dibandingkan yang dilakukan oleh dukun atau family dan lainnya. Hal mana sangat berhubungan dengan masalah kebersihan dan kelengkapan peralatan yang digunakan dalam proses tersebut.

Hasil survei menunjukkan bahwa di Kota Palu pertolongan kelahiran yang dilakukan oleh bukan tenaga medis masih cukup tinggi yaitu 8,87 persen oleh dukun, dan 1,67 persen oleh famili dan lainnya. Persalinan yang ditolong oleh dukun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai hanya 15,31 persen, namun persalinan yang ditolong oleh famili dan lainnya mengalami kenaikan dari 1,25 persen pada tahun 2007 menjadi 1,67 persen

tahun 2008. Angka tersebut relatif lebih baik bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah.



Gambar 4. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Palu Tahun 2007

Sementara itu proses penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis semakin meningkat yaitu masing-masing oleh dokter sebesar 39,77 persen, bidan dan tenaga medis lainnya sebesar 60,23 persen.

Secara umum proses penolong kelahiran di Kota Palu lebih baik dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Tengah. Angka selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel III.2. Persentase Penolong Kelahiran Menurut Daerah Tahun 2008

Daerah	Penolong Kelahiran			
	Dokter	Bidan/ Tenaga Medis Lain- nya	Du- kun	Fami- li dan Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,57	21,61	72,73	4,09
2	4,89	41,60	49,97	3,54
3	6,68	32,01	57,16	4,16
4	15,14	62,43	21,17	1,26
5	10,02	32,03	48,38	9,57
6	4,50	32,72	58,37	4,41
7	7,75	30,68	59,83	1,74
8	4,07	29,30	52,79	13,84
9	6,14	25,54	58,45	9,88
10	24,75	57,65	13,04	4,57

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Ket: 1 = BangKep 2 = Banggai
3 = Morowali 4 = Poso
5 = Donggala 6 = Tolitoli
7 = Buol 8 = Parimo
9 = Touna 10 = Palu

III.3. Air Susu Ibu (ASI)

Untuk memenuhi kebutuhan akan gizi balita pada awal masa pertumbuhannya telah tercukupi melalui pemberian ASI. Disamping sebagai sumber makanan, di dalam ASI juga terdapat zat yang dapat memberikan kekebalan alamiah yang tinggi pada bayi. Oleh karena itu pemberian ASI

adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pemberian ASI pada balita bisa menjadi salah satu indikator kesehatan balita, disamping indikator-indikator lainnya.

Kesadaran akan pentingnya pemberian ASI pada balita di Kota Palu cukup tinggi yaitu mencapai 88,60 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.3.1. Persentase Balita Usia 2-4 Tahun yang Diberi ASI atau Tidak Diberi ASI Tahun 2008

Jenis Kelamin	Diberi ASI		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
L	85,50	14,50	100
P	91,89	8,11	100
L+P	88,60	11,40	100

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Berdasarkan lamanya disusui untuk balita usia 2-4 tahun persentase terbesar adalah disusui lebih dari 24 bulan dimana angkanya mencapai 22,66 persen, urutan kedua adalah disusui selama 6-11 bulan dengan persentase mencapai 20,11 persen. Sedangkan untuk bayi perempuan persentase

terbesar adalah disusui lebih dari 24 bulan dengan angka 37,12 persen, dan urutan kedua adalah yang disusui antara 12-17 bulan dengan angka mencapai 21,55 persen.

Sementara itu hampir tidak ada lagi balita usia 2-4 tahun yang lamanya disusui kurang dari satu bulan. Secara keseluruhan persentase balita usia 2-4 tahun menurut lamanya disusui seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.3.2. Persentase Balita Usia 2-4 Tahun yang Pernah diberi ASI menurut Lamanya Disusui Tahun 2008

Lamanya disusui (bulan)	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1-5	14,72	11,15	13,10
6-11	19,42	20,78	20,11
12-17	28,13	28,36	28,25
18-23	19,60	12,23	15,88
24 +	18,12	27,12	22,66

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

III.4. Keluarga Berencana

Seperti telah diketahui bersama bahwa *Gerakan KB* yang awalnya dimulai dengan *Program KB* secara perlahan-lahan diharapkan akan menuju pada suatu kebutuhan yang sifatnya mendasar dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya gerakan KB secara keseluruhan akan menjadi *KB Mandiri*.

Namun sebagaimana diketahui pula bahwa dampak krisis ekonomi yang kemudian meluas menjadi krisis multidimensi tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak negatif terhadap gerakan KB yang selama ini dirasakan sangat besar manfaatnya. Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok juga diikuti oleh kenaikan harga bahan dan alat KB sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh daya beli sebagian penduduk, yang selanjutnya diduga akan berpengaruh terhadap jumlah akseptor KB.

Berdasarkan data tahun 2008 diketahui persentase penduduk perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menggunakan alat KB sebesar 68,19 persen, dan sisanya 31,81 persen tidak

pernah menggunakan KB, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.1. Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat KB Tahun 2008

Wilayah	Pernah Menggunakan Alat KB		
	Ya	Tidak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Palu	68,19	31,81	100
Sulteng	70,46	29,54	100

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Penduduk yang pernah menggunakan alat/cara KB tidak selamanya menggunakan KB, hal mana dimungkinkan karena pada saat tertentu dapat saja melepas/menghentikan penggunaan KB karena ingin mendapat keturunan, atau karena merasa tidak cocok dengan alat/cara KB yang digunakan atau karena alasan lainnya.

Tabel III.4.2. Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Sedang/Tidaknya Menggunakan Alat/Cara KB Tahun 2008

Wilayah	Sedang Menggunakan Alat/cara KB		
	Ya	Tidak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Palu	65,25	34,75	100
Sulteng	59,19	40,81	100

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Berdasarkan hal tersebut setelah ditelusuri dengan pertanyaan lainnya, maka diketahui bahwa sekitar 65,25 persen wanita yang pernah menggunakan alat/cara KB pada saat survei dilakukan sedang menggunakan alat/cara KB, sedangkan sisanya sekitar 34,75 persen tidak sedang menggunakan. Kondisi tersebut juga terjadi di Sulawesi Tengah secara umum, seperti tersaji pada Tabel III.4.2.

Berdasarkan alat/cara KB yang digunakan, ternyata akseptor KB terbesar adalah yang menggunakan Suntikan KB yaitu mencapai 46,49 persen, diikuti oleh yang menggunakan

Pil KB 34,05 persen, sedangkan cara/alat yang paling kurang digunakan adalah Kondom, cara tradisional dan MOP. Demikian halnya dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah, dimana pemakaian alat kontrasepsi dengan suntikan KB adalah yang terbesar yaitu mencapai 46,43 persen dan diikuti oleh yang menggunakan Pil KB sebesar 39,76 persen. Secara umum persentase penggunaan alat/cara KB seperti terlihat pada tabel III.4.3.

7

Tabel III.4.3. Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Cara/Alat KB Tahun 2008

Jenis Alat/Cara KB	Wilayah	
	Kota Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
MOW	2,56	1,57
MOP	1,02	0,57
AKDR/IUD	10,32	4,34
Suntikan KB	46,49	46,43
Susuk KB	3,15	5,91
Pil KB	34,05	39,76
Kondom dan Tradisional	2,41	1,43

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

PENDIDIKAN

Sumber daya manusia adalah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, karena manusia adalah merupakan faktor produksi aktif, sedangkan sumber daya alam merupakan faktor produksi yang bersifat pasif. Untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka perkembangan dan peningkatan sumber daya manusia mutlak diperlukan untuk menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan. Untuk maksud tersebut maka faktor pendidikan semakin besar perannya.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, oleh karenanya kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD'45 dan GBHN, dimana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian maka sangat dirasakan bahwa pendidikan

mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan kesejahteraan penduduk.

Masalah pendidikan telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada pendidikan dasar pemerintah telah menyiapkan sarana pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah inpres untuk meningkatkan pemerataan pendidikan sampai ke pelosok daerah pedesaan. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun yang membebaskan biaya sekolah berupa SPP kepada anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Hal mana dimaksudkan untuk membantu agar penduduk yang kurang mampu tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya tanpa dibebani oleh pengeluaran biaya pendidikan. Selanjutnya program tersebut dimantapkan lagi dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan program tersebut diharapkan partisipasi sekolah untuk anak-anak usia tersebut akan menikmati pendidikan

Pendidikan

sampai pada tingkat sekolah lanjutan pertama.

IV. 1. Partisipasi Pendidikan

Hasil Susenas 2008 menunjukkan di Kota Palu masih terdapat sekitar 0,74 persen penduduk usia 10 tahun ke atas tidak/belum pernah sekolah. Sementara itu penduduk yang masih sekolah sebesar 26,85 persen, dan sisanya sekitar 71,91 tidak sekolah lagi.

Penduduk yang masih berpartisipasi dalam pendidikan (masih sekolah) sekitar 6,56 persen berada pada bangku sekolah dasar (SD); 5,49 persen pada sekolah lanjutan pertama (SLTP); 6,67 persen pada sekolah menengah umum (SMU); dan sisanya sekitar 8,13 persen berada di perguruan tinggi.

Dilihat dari data persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang masih sekolah nampak masing-masing 25,11 persen untuk laki-laki dan perempuan sebesar 28,53 persen. Dari data tersebut tercermin bahwa partisipasi sekolah laki-laki secara keseluruhan lebih tinggi dari pada perempuan. Namunpun demikian, bila dilihat menurut tingkat pendidikan tinggi nampak pada jenjang pendidikan tinggi, dimana persentase penduduk

perempuan yang masih sekolah lebih rendah dari persentase penduduk laki-laki, yaitu masing-masing 7,78 persen untuk perempuan dan 8,47 persen untuk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi.

Tabel IV.1.1. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan Tahun 2008

Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0,93	1,56	1,24
2. Masih sekolah			
a. SD	6,55	6,57	6,56
b. SLTP	6,04	4,91	5,49
c. SLTA	7,46	5,85	6,67
d. PT	8,47	7,78	8,13
3. Tidak bersekolah lagi	70,54	73,33	71,91
Total	100	100	100

Sumber : Diolah dari Susenas 2008

Dalam bidang pendidikan perbedaan jenis kelamin masih menjadi kendala, dimana peluang penduduk perempuan untuk memperoleh pendidikan lebih kecil dari laki-laki. Hal mana jelas terlihat pada penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah hampir mencapai 2 kali penduduk laki-laki, namun pada pendidikan tinggi gejalanya menunjukkan

hal yang terbalik. Berdasarkan kelompok umur, maka partisipasi sekolah dapat terlihat seperti Tabel IV.1.2.

Tingkat partisipasi sekolah mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka partisipasi sekolah semakin rendah dan sebaliknya.

Tabel IV.1.2. Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0,93	1,56	1,24
2. Masih sekolah	28,52	25,11	26,85
3. Tidak bersekolah lagi	70,54	73,33	71,91
Total	100	100	100

Sumber : Susenas 2008

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan hal tersebut diantaranya :

a. Sarana pendidikan, dalam hal ini menyangkut ketersediaannya, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan jumlah sarannya semakin sedikit dan biasanya terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan, sehingga memerlukan transportasi dan bahkan tempat kost

agar bisa lebih dekat dengan sekolah.

- b. Kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah, berdampak pada dua hal, yaitu: pertama, walaupun telah diupayakan sedemikian rupa oleh pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SLTP dengan menghapuskan pungutan SPP, tetapi pada kenyataannya masih sangat banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya; kedua, kemampuan ekonomi rumah tangga yang relatif masih rendah mendorong orang tua/atau bahkan anak yang bersangkutan untuk ikut terjun ke dalam dunia kerja guna membantu menambah pendapatan rumah tangga.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih perlu lebih ditanamkan. Hal ini di samping berkaitan dengan masalah ekonomi juga sangat berkaitan dengan masalah budaya.

IV.2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (dapat membaca dan menulis) adalah merupakan refleksi dari partisipasi pendidikan oleh penduduk pada masa lampau. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Kota Palu Tahun 2008 sudah cukup tinggi dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Tengah, namun demikian masih terdapat sekitar 1,04 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya dimana masih terdapat penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah.

Tabel IV.2. Angka Melek huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kota Palu Tahun 2005 s.d. 2008 (%)

Jenis Kelamin	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L	98,90	99,25	99,62	99,34
P	97,43	98,86	98,76	98,57
L+P	98,16	99,05	99,19	98,96

Sumber: Diolah dari Susenas 2005-2008

IV.3. Tingkat Pendidikan

Indikator lain dalam bidang pendidikan yang dapat menjadi ukuran besarnya peluang/kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan pada suatu tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Tabel IV.3. Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2008

Ijasah Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Tmt SD	13,13	15,77	14,42
SD/Sederajat	18,22	20,16	19,17
SLTP sederajat	18,24	17,27	17,76
SMU/MA	30,85	27,36	29,15
SMK	0,61	1,86	1,13
DI s.d. DII	7,31	5,95	6,65
DIII / S3	11,63	11,82	11,72

Sumber : Diolah dari Susenas 2008

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk pada suatu daerah mencerminkan kualitas SDM daerah tersebut. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan mengasumsikan bahwa semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melalui pendidikan yang dijalannya, dengan demikian kualitas SDM-nya diharapkan lebih baik dibandingkan penduduk dengan pendidikan yang rendah.

Dari tabel di atas terlihat proforsi penduduk yang menamatkan pendidikan SMU (23,83 %), untuk penduduk laki-laki dan (25,40 %), untuk penduduk perempuan. Sedangkan yang memiliki ijazah perguruan tinggi (DI s.d. S3) relatif masih kecil jumlahnya.

IV.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana pendidikan disini terbatas pada jumlah sekolah, guru, dan murid, serta indikator-indikator yang dihasilkannya seperti rasio murid terhadap guru, dan rasio murid terhadap sekolah. Pada Tahun ajaran 2007/2008 jumlah sekolah dasar dan sederajat tercatat 178 buah dengan 1.964 orang guru dan 37.193 orang murid. Sedangkan pada tingkat SLTP dan SMU/SMK jumlah sekolah, guru, dan murid lebih rendah dari sekolah dasar, sebagaimana terlihat pada Tabel IV.4.1. Rasio antara murid terhadap guru pada tingkat SD sebesar 19 yang artinya rata-rata setiap satu orang guru pada sekolah

dasar mengajar 19 orang murid, sementara itu tiap sekolah rata-rata menampung 1.964 orang murid.

Tabel IV.4.1. Jumlah Sarana/prasarana Pendidikan di Kota Palu Tahun 2008

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	178	1.964	37.193
SLTP	27	975	14.525
SMU/MA	22	544	10.244
SMK	22	433	7.027

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu.

Pada tingkat SLTP rata-rata setiap 1 orang guru mengajar 15 orang murid, sedangkan daya tampung untuk sekolah SLTP rata-rata sebanyak 537 orang murid, dan pada SMU/MA Rasio Murid Guru sebesar 19 dengan daya tampung rata-rata sebanyak 465 orang murid, sedangkan pada SMK rasio murid guru sebesar 16 dengan daya tampung murid rata-rata 319 orang (Tabel IV.4.2)

Tabel IV.4.2. Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Sekolah T.A. 2008/2009

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah
(1)	(2)	(3)
SD	19,00	213,00
SLTP	15,00	537,96
SMU/MA	19,00	465,64
SMK	16,00	319,41

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Istilah tenaga kerja yang digunakan dalam konsep ketenagakerjaan adalah seluruh penduduk yang secara potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Biasanya di negara-negara maju penduduk yang digolongkan dalam tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 - 64 tahun. Berbeda halnya dengan di Indonesia, dimana yang digolongkan dalam tenaga kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Hal ini didasari atas realita bahwa anak-anak yang bekerja di bawah usia 15 tahun sangat banyak jumlahnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian.

Sebagai ibu kota propinsi yang merupakan pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan, maka lapangan usaha ketenagakerjaan di Kota Palu didominasi oleh sektor jasa dan sektor perdagangan.

Keadaan perekonomian yang kurang menentu saat ini sangat berpengaruh terhadap masalah ketenagakerjaan, dimana kemampuan dunia usaha semakin melemah sehingga dilakukan langkah-langkah kebijaksanaan untuk merumahkan sebagian karyawan dan bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi demikian banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industri, konstruksi dan jasa swasta.

Situasi ketenagakerjaan di Kota Palu sangat rentan menghadapi kondisi perekonomian saat ini, mengingat umumnya lapangan usaha di daerah perkotaan secara langsung terkena dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung, kecuali sektor jasa pemerintah.

V.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (usia 10 tahun ke atas) digolongkan sebagai: (i) angkatan kerja bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan (ii) bukan angkatan kerja bila mereka sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Banyaknya penduduk yang berada pada golongan angkatan kerja menggambarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Sedangkan pencari kerja adalah mereka yang belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dalam seminggu yang lalu, termasuk mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru dalam

seminggu yang lalu. Pada tahun 2008 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Palu tercatat sebesar 74,64 untuk laki-laki dan 47,96 untuk perempuan, sehingga secara keseluruhan TPAK hanya mencapai 60,46. Ini berarti dari setiap 1000 orang penduduk laki-laki di Kota Palu yang berumur 10 tahun ke atas terdapat sekitar 604 orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan sisanya 396 orang tergolong dalam bukan angkatan kerja. Sementara itu penduduk perempuan terdapat sekitar 479 orang tergolong angkatan kerja dari setiap 1000 orang penduduk perempuan yang berusia 10 tahun ke atas.

Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dari tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Hal ini dapat dimaklumi bahwa penduduk laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mencari nafkah terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dibandingkan dengan penduduk wanita.

Tabel V.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Palu dan Sulawesi Tengah 2008 (%)

Jenis Kelamin/ Daerah	Tahun 2008	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	
-Laki-laki	74,64	86,52
-Perempuan	47,96	52,35
-Laki-laki+ Perempuan	60,46	69,76

Sumber: Diolah dari Sakernas 2008

Bila dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Tengah TPAK Kota Palu jauh lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan wanita. Hal mana dapat dijelaskan bahwa sebagai pusat pendidikan maka sebagian penduduk usia kerja tergolong dalam bukan angkatan kerja, dimana 21,64 persen di antaranya sedang bersekolah.

V.2. Pengangguran dan Jam Kerja

Pengangguran adalah perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah salah satu masalah kependudukan yang sangat kompleks dan memerlukan kebijaksanaan lintas sektor untuk penanggulangannya. Rendahnya kesempatan memperoleh pekerjaan pada satu sisi dan di sisi yang lain terjadi penambahan jumlah penduduk usia kerja yang masih cukup tinggi mengakibatkan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun akan terakumulasi semakin tinggi.

Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka (Unemployment Rate) di Kota Palu tercatat sebesar 8,30 persen dengan komposisi untuk laki-laki sebesar 6,26 persen dan wanita sebesar 11,10 persen.

Tabel V.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Unemployment Rate) Tahun 2008 (%)

Jenis Kelamin/ Daerah	Tahun	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
Kota Palu		
-L	6,26	3,53
-P	11,10	8,76
-L + P	8,30	5,45

Sumber : diolah dari Sakernas 2008.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Palu jauh lebih tinggi dari Sulawesi Tengah, hal mana diduga karena di daerah perkotaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan jauh lebih sulit dari pada di daerah pedesaan. Pencari kerja di daerah pedesaan akan lebih mudah mendapat pekerjaan mengingat lapangan usaha pada sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di sisi lain banyak terjadi urbanisasi ke daerah kota yang tujuan utamanya hanya untuk mencari pekerjaan.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, ternyata kaum wanita lebih sulit mendapatkan pekerjaan dari pada laki-laki, hal mana ditunjukkan oleh Tabel V.2.1 bahwa tingkat pengangguran terbuka wanita lebih tinggi dibanding laki-laki.

Tingkat produktivitas sangat tergantung dari jumlah jam kerja yang digunakan.

Jumlah jam kerja seluruhnya selama seminggu oleh penduduk yang bekerja di Kota Palu Tahun 2007 bervariasi seperti terlihat pada Tabel V.2.2. Sebagian besar (57,03 %) penduduk laki-laki bekerja di atas 45 jam per minggu, sedangkan untuk penduduk perempuan 40,04 persen bekerja selama di atas 45 jam per minggu. Pekerja di daerah perkotaan rata-rata memerlukan waktu bekerja lebih besar dari pada di daerah pedesaan, hal ini terlihat dari persentase penduduk yang bekerja di atas 45 jam per minggu lebih besar di daerah perkotaan dari pada semua daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Demikian pula sebaliknya persentase penduduk yang membutuhkan waktu kerja di bawah 10 jam per minggu di daerah perkotaan lebih kecil dari pada di daerah pedesaan.

Tabel V.2.2. Persentase Penduduk Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin Tahun 2008

Kela- min	Jumlah jam kerja seluruhnya (Jam)			
	< 10	10-34	35-44	> 45
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L	5,16	12,23	25,59	57,03
P	6,94	20,88	32,14	40,04
L+P	5,88	15,76	28,27	50,08

Sumber: Diolah dari Sakernas 2008

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan maka terlihat jam kerja laki-laki lebih banyak, hal ini diduga karena di samping bekerja, umumnya perempuan juga melakukan kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan sehingga jam kerjanya relatif lebih sedikit dibanding laki-laki.

Tabel V.2.3. Rata-rata Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2008

Kela- min	Daerah	
	Kota Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
L	47,38	39,77
P	42,76	33,60
L+P	45,49	37,58

Sumber: Diolah dari Sakernas 2008

Sementara itu bila dilihat dari lapangan usahanya, terlihat bahwa sekitar 34,42 persen penduduk bekerja pada sektor perdagangan, diikuti oleh sektor jasa sebesar 34,11 persen. Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya sekitar 7,90 persen.

Penduduk yang terserap bekerja pada Sektor industri di Kota Palu mencapai sekitar 5,05 persen, sektor Angkutan sebesar 7,25 persen, dan sektor konstruksi sebesar 7,98 persen.

Rendahnya persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian di sebabkan karena potensi lahan pertanian di Kota Palu relatif

sedikit yaitu hanya terdapat pada beberapa kelurahan yang terletak di daerah pinggiran kota. Disamping itu penduduk kota palu adalah penduduk yang sedang berada pada masa transisi dari penduduk agraris menuju penduduk yang berorientasi pada sektor industri dan jasa. Ini merupakan ciri khas daerah perkotaan, dimana sektor perdagangan, jasa dan industri menjadi primadona kegiatan penduduknya.

Tabel V.2.4. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2008

Lapangan Usaha Utama	Jenis Kelamin		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	8,86	6,51	7,90
Pertambangan	1,40	0,00	0,83
Industri	6,19	3,14	5,05
Listrik, Gas & Air	0,26	0,26	0,26
Konstruksi	12,68	1,17	7,98
Perdagangan	27,33	44,67	34,42
Angkutan	10,55	2,47	7,25
Jasa Perbankan	2,78	1,38	2,21
Jasa Kemasyarakatan	29,95	40,14	34,11
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Sakernas 2008

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Di samping kebutuhan pangan dan sandang, kebutuhan akan perumahan (papan) adalah merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Rumah merupakan tempat berteduh dari cuaca panas dan hujan, tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga, tempat menyimpan barang-barang milik keluarga, dan merupakan ciri khas budaya, serta berbagai kegunaan lainnya.

Sekelompok penduduk yang membangun rumah akan membentuk lingkungan perumahan yang menimbulkan masalah lingkungan, baik masalah kesehatan maupun interaksi sosial dan budaya di antara penduduknya.

Kebutuhan akan perumahan kian bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, terlebih di daerah-daerah perkotaan. Permasalahan yang akhirnya timbul bukan hanya bagaimana membangun perumahan penduduk, tetapi juga bagaimana menyediakan lokasi pemukiman dan fasilitas sosial serta fasilitas lainnya yang tertata secara rapi agar tidak menimbulkan masalah sosial dikemudian hari.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembangunan perumahan yang semakin pesat adalah bergesernya penggunaan lahan yang semula sebagai lahan pertanian secara

perlahan-lahan berkurang karena digunakan sebagai daerah pemukiman, sehingga akan berdampak negatif pada produksi hasil pertanian. Di samping itu juga akan timbul masalah lingkungan alam yaitu pencemaran terhadap tanah dan air.

Untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari pembangunan perumahan, sangat diperlukan intervensi pemerintah dalam mengatur tata guna lahan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung lingkungan yang tersedia.

Perumahan dan fasilitas tempat tinggal/rumah merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraannya. Unsur-unsur rumah yang sering menjadi indikator perumahan adalah kualitas dan fasilitas bangunan.

6.1. Kualitas Bangunan

Melalui survei sosial ekonomi nasional (Suse2as) tahun 2008 dikumpulkan beberapa informasi tentang perumahan seperti kondisi/jenis atap, jenis dinding dan lantai rumah yang digunakan oleh rumah tangga. Dari survei tersebut diperoleh hasil bahwa sekitar 88,28 persen rumah tangga di Kota Palu menempati

rumah beratap seng; 4,96 persen atap genteng, dan 3,43 persen atap dari daun-daunan.

Jenis dinding terluas yang dipakai terlihat bahwa 70,32 persen rumah yang ditempati menggunakan dinding tembok, 28,81 persen kayu, 0,00 persen bambu dan bahan lainnya 0,87 persen. Sementara itu persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas yang ditempati nampak bahwa 98,84 persen menempati rumah dengan jenis lantai bukan tanah, dan sisanya 1,16 lantai tanah. Secara umum kondisi perumahan di Kota Palu relatif lebih baik dari kondisi perumahan di Sulawesi Tengah secara keseluruhan, hal mana terlihat dari beberapa indikator perumahan yang dipantau dalam survei seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel VI.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap, Jenis Dinding dan Jenis Lantai Terluas yang Ditempati di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2008

Indikator yang Diamati (1)	Daerah	
	Palu (2)	Sulteng (3)
Jenis Atap		
- Beton	2,22	1,20
- Genteng	4,96	3,94
- Sirap	0,76	0,91
- Seng	88,28	70,96
- Asbes	0,35	0,78
- Rumbia	3,43	21,95
- Lainnya	0,00	0,26

Jenis Dinding		
- Tembok	70,32	47,59
- Kayu	28,81	49,12
- Bambu	0,00	2,81
- Lainnya	0,87	0,47
Jenis Lantai		
- Bukan Tanah	98,84	91,56
- Tanah	1,16	8,44

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

VI. 2. Fasilitas

Indikator-indikator fasilitas perumahan meliputi rumah tangga pengguna listrik, pengguna air bersih, fasilitas penampungan tinja dengan tangki septik. Indikator-indikator tersebut disamping sebagai salah satu indikator tingkat sosial ekonomi, juga berkaitan erat dengan masalah kesehatan lingkungan. Proporsi rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu mencapai 96,91 persen, angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Sementara itu terdapat sekitar 23,96 persen rumah tangga telah memanfaatkan sumber air bersih dengan menggunakan air kemasan, ledeng 10,70 persen dengan pompa 29,94 persen. Untuk fasilitas lainnya yaitu tempat buang air besar terdapat sekitar 98,28 persen rumah tangga telah menggunakan leher angsa sebagai tempat pembuangan tinja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel VI. 2.1. Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Oleh Rumah Tangga Tahun 2008

Fasilitas Air Minum	Daerah	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan/ Air isi Ulang	23,96	4,51
Leding	10,70	17,95
Pompa	29,94	10,34
Sumur	32,54	31,88
Mata Air	2,13	25,51
Air sungai/hujan	0,74	8,74
Lainnya	0,00	1,08

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Tabel VI. 2.2. Persentase Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Oleh Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2008

Fasilitas Tempat Buang air Besar	Daerah	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
Leher Angsa	98,28	83,54
Plengsengan	0,86	5,21
Cemplung	0,56	8,92
Lainnya	0,31	2,33

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Tabel VI. 2.3. Persentase Penggunaan Fasilitas Penerangan Oleh Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2008

Fasilitas Penerangan	Daerah	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
Listrik	96,91	77,72
Petromak	0,69	2,33
Pelita/Sentir	2,40	19,39
Lainnya	0,00	0,56

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

PENGELUARAN/KONSUMSI

Tingkat kesejahteraan (bidang ekonomi) suatu rumahtangga atau penduduk dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumahtangga atau penduduk yang bersangkutan. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh penduduk sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya konsumsi penduduk dalam Susenas melalui pendekatan pengeluaran .

Semakin tinggi pengeluaran penduduk baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan berarti pendapatan penduduk tersebut juga semakin tinggi, hal mana dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk bersangkutan akan semakin baik.

VII.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan

Mengingat bahwa tingkat pendapatan penduduk sangat bervariasi, maka dalam Susenas Tahun 2008 pengelompokan pengeluaran perkapita sebulan digolongkan 9 golongan seperti terlihat pada Tabel VII.1.

Untuk Kota Palu modus pengeluaran makanan berada pada golongan pengeluaran Rp.200.000 s.d 299.999,- per bulan, atau dengan persentase 32,29 persen. Adapun 4,87 persen berada pada kelompok pengeluaran lebih kecil dari Rp. 100.000,-; 9,11 persen

pada kelompok Rp. 100.000 s.d. 149.999,-; 12,99 persen pada kelompok Rp. 150.000 s.d. 199.999,-; 24,02 persen pada kelompok Rp. 300.000 s.d. 499.999,-; 12,16 persen pada kelompok Rp. 500.000 s.d. 749.999,-; 2,58 persen pada kelompok Rp.750.000 s.d. 999.999,- ; 1,93 persen lebih Rp. 1.000.000 ,- Tabel VII.1. terlihat distribusi secara keseluruhan persentasenya lebih banyak berada pada golongan pengeluaran di atas Rp. 200.000 per bulan. Hal sama terjadi pada penduduk Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

VII.2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan

Sebagaimana disajikan pada Tabel VII.2. bahwa sekitar 11,43\ persen penduduk Kota Palu pengeluaran untuk konsumsi non makanannya pada kelompok pengeluaran lebih kecil dari Rp.100.000.-; 14,84 persen berada Rp.100.000 s.d. 149.999.- per bulan, sebanyak 12,07 persen berada pada kelompok pengeluaran Rp. 150.000,- s.d. 199.999,-; 19,86 persen pada kelompok Rp. 200.000 s.d. 299.999,-; 19,86 persen pada kelompok Rp. 200.000 s.d. 299.999,-; 20,64 persen pada kelompok Rp. 300.000 s.d. 499.999,-; 10,93 persen pada kelompok Rp. 500.000 s.d. 749.999,-;

3,91 persen pada kelompok Rp. 750.000 s.d. 999.999,-; 6,32 persen pada kelompok lebih Rp. 1.000.000 ,-

Sama halnya dengan pengeluaran konsumsi untuk makanan, pengeluaran konsumsi untuk non makanan pun pada semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terkumpul pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 300.000,- per bulan.

Secara ekonomi terdapat hubungan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi pula persentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Sebaliknya jika pendapatan semakin rendah maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi, bahkan pada kondisi rumah tangga tertentu hampir semua pendapatannya dikeluarkan untuk pemenuhan konsumsi makanan.

Tabel VII.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita sebulan Tahun 2008

Golongan Pengeluaran (Rp)	Daerah	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
< 100.000	4,87	11,35
100.000-149.999	9,11	14,52
150.000-199.999	12,99	26,94
200.000-299.999	32,29	31,18
300.000-499.999	24,02	12,84
500.000-749.999	12,16	2,31
750.000-999.000	2,63	0,52
1000.000 <	1,93	0,35

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Tabel VII.2. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan Perkapita sebulan Tahun 2008

Golongan Pengeluaran (Rp)	Daerah	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
< 100.000	11,43	38,91
100.000-149.999	14,84	18,08
150.000-199.999	12,07	12,14
200.000-299.999	19,86	12,76
300.000-499.999	20,64	10,75
500.000-749.999	10,93	4,46
750.000-999.000	3,91	1,37
1000.000 <	6,32	1,54

Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Tabel VII.3. Persentase Penduduk Menurut Total Golongan Pengeluaran Perkapita sebulan Tahun 2008

Golongan Pengeluaran (Rp)	Daerah	
	Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
< 100.000	0,17	8,83
100.000-149.999	1,73	6,96
150.000-199.999	4,60	9,64
200.000-299.999	9,68	23,67
300.000-499.999	30,33	34,96
500.000-749.999	21,79	14,02
750.000-999.000	12,57	4,95
1000.000 <	19,13	4,96

Sumber: Diolah dari Susenas 2008